

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA LANGSUNG DI PROVINSI BALI**

**Ni Wayan Nuryanti Dewi<sup>1</sup>  
Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: nuryantidewi94@gmail.com telp: +62 85 738 168 645

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas otonomi daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menguji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Periode pengamatan yaitu 7 tahun, terdiri dari tahun 2007-2013. Metode analisis data dilakukan dengan *path analysis* dan uji Sobel. Hasil yang diperoleh menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung. Selanjutnya Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, belanja langsung, pertumbuhan ekonomi.

### **ABSTRACT**

This study aims to review the effectiveness of regional autonomy in maximizing economic growth, as well as examine how the influence of local revenues and revenue-sharing fund on economic growth through direct expenditure in the District / City of Bali Province. The samples using purposive sampling technique, with the criteria in the realization of the budget has been classified direct and indirect expenditure clearly. Namely 7-year observation period, consisting of 2007-2013. Methods of data analysis done by path analysis and Sobel test. The results obtained showed regional revenue directly influence the Direct Expenditure and Revenue Sharing Fund does not directly influence the Direct Expenditure. Furthermore, DBH and Direct Expenditure directly affect economic growth, while local revenue does not directly affect economic growth. Then the local revenue indirect effect on economic growth through direct expenditure, while DBH no indirect effect on the economic growth through direct expenditure.

**Keywords:** local revenue, revenue sharing fund, direct expenditure, economic growth

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu Negara. Semakin besar tingkat pembangunan suatu Negara mengindikasikan Negara tersebut semakin maju dan berkembang. Konteks pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang masuk dalam teori makro ekonomi. Tinggi rendah angka pembangunan dilihat dari *trend* pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Pertumbuhan ekonomi meliputi segenap aktivitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dan menentukan angka pendapatan nasional suatu Negara serta kesejahteraan masyarakatnya (Putro, 2010). Indonesia dalam lingkup yang lebih spesifik merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang baik adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali adalah salah satu daerah dengan sektor pariwisata sebagai tulang punggung utama dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikalkulasi serta diprediksikan melalui besaran angka yang tercantum dalam Tabel produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai totalitas dari akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada siklus perekonomiannya. (Kartika dan Dwirandra, 2014). PDRB atas dasar harga konstan dijadikan acuan dalam mengkalkulasi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memacu angka pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama pada masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan asset tetap di bidang infrastruktur, jalan raya, airport, transit, sistem saluran air, dan lainnya sarana publik lainnya sangat berkontribusi besar terhadap tingkat produktivitas (Aschauer, 1989). Tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2007-2013**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jembrana	1510513	1586806	1663345	1739284	1836900	1945292	2049927
Tabanan	2111463	2221760	2342711	2475716	2619688	2774394	2941821
Badung	4860132	5196125	5528320	5886369	6280211	6738308	7170966
Gianyar	2841726	3009320	3187823	3380513	3609056	3854011	4101807
Klungkung	1125344	1182357	1240543	1307889	1383890	1467352	1551109
Bangli	946113.4	984129.5	1040363	1092116	1155899	1225104	1293885
Karangasem	1583404	1663749	1747169	1836132	1931439	2042135	2160734
Buleleng	2908761	3076504	3266343	3457476	3668884	3907936	4170207
Denpasar	4708518	5029895	5358246	5710412	6097167	6535171	6962611

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Tabel 1 memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali meningkat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 7.170.966 juta dan pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli sebesar 1.293.885 juta.

**Tabel 2.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bali Periode 2013**

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Jembrana	0.05
Tabanan	0.06
Badung	0.06
Gianyar	0.06
Klungkung	0.05
Bangli	0.05
Karangasem	0.05
Buleleng	0.06
Denpasar	0.06

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Tabel 2 memaparkan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013. Kabupaten Jembrana mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05 yang berarti meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya (2012) sebesar 104.635 juta ( $5\% \times 1.945.292$  juta). Kemudian Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06 yang berarti meningkat 6% dari tahun 2012 sebesar 167.427 juta ( $6\% \times 2.774.394$  juta). Selanjutnya Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06 yang berarti meningkat 6% dari tahun 2012 sebesar 432.658 juta ( $6\% \times 6.738.308$  juta). Berikutnya Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06 yang berarti meningkat 6% dari tahun 2012 sebesar 247.796 juta ( $6\% \times 3.854.011$  juta). Selanjutnya Kabupaten Klungkung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05 yang berarti meningkat 5% dari tahun 2012 sebesar 83.757 juta ( $5\% \times 1.467.352$  juta). Kemudian Kabupaten Bangli mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05 yang berarti meningkat 5% dari tahun 2012 sebesar 68.781 juta ( $5\% \times$

1.225.104 juta). Berikutnya Kabupaten Karangasem mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05 yang berarti meningkat sebesar 5% dari tahun 2012 sebesar 118.599 juta ( $5\% \times 2.042.135$  juta). Selanjutnya Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06 yang berarti meningkat 6% dari tahun 2012 yaitu sebesar 262.271 juta ( $6\% \times 3.907.936$  juta). Kemudian Kota Denpasar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06 yang berarti meningkat 6% dari tahun 2012 yaitu sebesar 427.440 juta ( $6\% \times 6.535.171$  juta).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tertinggi didominasi oleh wilayah Bali selatan dengan angka tertinggi yang dicapai oleh Kabupaten Badung sebesar 432.658 juta dan laju pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli dengan angka 68.781 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Realisasi otonomi daerah yang dicanangkan pusat, berusaha memaksimalkan potensi segenap daerah dan memaksimalkan tumbuh kembangnya perekonomian di wilayah bersangkutan, meminimalisir timpangan antar daerah, serta mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal (Andirfa, 2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait otonomi daerah, melimpahkan otoritas kekuasaan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga masing-masing, yang meliputi pembangunan secara optimal, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dibidang sosial dan ekonomi.

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

Kebijakan otonomi daerah membutuhkan modal yang besar guna merealisasikan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah dalam konteks pertumbuhan ekonomi berfokus pada anggaran belanja modal. Menurut Kartika dan Dwirandra (2014), belanja modal sebagai bagian dari belanja yang dilakukan oleh daerah. Anggaran belanja modal adalah satu kesatuan elemen belanja yang terkandung di dalam belanja langsung. Belanja langsung adalah salah satu dari dua bagian utama belanja daerah selain belanja tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan belanja modal terletak pada luas lingkungannya, di mana belanja langsung mencakup aspek yang lebih luas, sedangkan belanja modal lebih sempit.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal adalah bagian belanja langsung yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, karena secara spesifik berfokus pada pembangunan aset tetap. Aset tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang akan memiliki umur ekonomis jangka panjang dengan asumsi akan memberikan pendapatan di masa yang akan datang. Menurut Kitchen (2004), menyatakan bahwa belanja modal meliputi dua elemen belanja utama yaitu, belanja perawatan lingkungan dan belanja operasi. Penelitian Yovita (2011) membuktikan bahwa PDRB mampu memengaruhi belanja modal secara positif. Selanjutnya Sumarthini dan Murjana Yasa (2015) menyatakan PAD terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Pembangunan aset tetap ditujukan pada pelayanan publik, sehingga dapat memaksimalkan produktivitas perekonomian. Kepemilikan atas aset tetap yang

memadai, diasumsikan selain menjadi sorotan utama bagi pemodal dalam berinvestasi juga memaksimalkan kegiatan masyarakat yang memacu berputarnya roda perekonomian, sehingga angka produktivitas semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Abimanyu (dalam Kartika dan Dwirandra, 2014) yang mengemukakan, jika belanja modal meningkat, maka akan mendongkrak angka produktivitas yang diiringi dengan meningkatnya angka investasi, sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pembangunan fasilitas publik melalui realisasi belanja langsung dapat memaksimalkan potensi Kabupaten/Kota di Bali. Sesuai dengan asumsi tersebut maka tingginya belanja langsung berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD, baik yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan penelitian Babatunde and Christopher (2013), dimana belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Chinweoke *et al* (2014), dan Sumarthini dan Murjana Yasa (2015). Selanjutnya Akonji *et al* (2013) yang menyatakan belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif berbeda, ukuran pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana ukuran pemerintah dalam penelitian diproksikan dengan belanja pemerintah (Cooray, 2009). Nurudeen and Usman (2010), menyimpulkan bahwa meningkatnya belanja pemerintah, khususnya pada bidang transportasi, komunikasi dan kesehatan berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Nworji *et al* (2012), menyimpulkan bahwa pengalokasian

belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, di sisi lain belanja modal pada bidang pelayanan masyarakat dan sosial berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui realisasi belanja langsung periode 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

**Tabel 3.**  
**Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**  
**Periode 2007-2013**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jembrana	187233	176486	182067	149065	188704	269885	302503
Tabanan	171344	187102	194020	217696	243299	337372	389419
Badung	426145	690257	666080	415849	513018	1065550	1267236
Gianyar	221969	236310	261843	218283	287856	308588	421903
Klungkung	186005	148534	176743	117639	133814	192162	195411
Bangli	199050	186394	139564	135969	208680	196495	176604
Karangasem	206606	264065	252998	153669	262479	343564	390377
Buleleng	265445	254297	248751	196524	322226	292690	469075
Denpasar	279517	270886	319213	332997	419554	609115	736905

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Tabel 3 memaparkan bahwa tingkat belanja langsung Kabupaten/Kota Provinsi Bali berfluktuasi cenderung meningkat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat belanja langsung tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1.267.236 juta dan tingkat belanja langsung terendah diperoleh Kabupaten Bangli sebesar 176.604 juta.

Gugus (2013) menyatakan dana bagi hasil adalah dana yang ditujukan mendanai segenap kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang diperoleh dari pengalokasian persentase pendapatan APBN (UU No.33 Tahun



2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah). DBH yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan bukan pajak. DBH merupakan modal utama yang berasal dari dana perimbangan selain DAU dan DAK serta bukan bagian dari PAD. DBH adalah modal potensial bagi daerah guna membiayai pembangunan dan belanja daerah. Salah satu contoh DBH antara pusat dan daerah Provinsi Bali adalah dana perimbangan PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, di mana jumlah dana perimbangan yang diperoleh Bali sangat kecil. Sebenarnya mekanisme yang berlaku dalam kondisi Negara berkembang, pemerintah mesti mendorong pertumbuhan daerah, dengan mengalokasikan anggaran 20 – 50 persen dari PDB (produk domestik bruto) untuk dana perimbangan daerah atau Bali dan jika dikalikan PDB dari sektor pariwisata saja, yaitu USD 2 miliar atau 22 triliun. Apabila secara riil 20 – 25 persen dengan PDB sektor pariwisata, Bali mestinya memperoleh berlipat-lipat dari yang diterima sekarang yakni 557 miliar. PDB Bali yang dikumpulkan dari semua sektor untuk tahun 2008 mencapai Rp. 47,8 triliun. Ini berasal dari pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan lain-lain. Berdasarkan rumus yang diberikan di atas yaitu hak Bali adalah 20-25 persen, dengan angka paling rendah sekitar Rp. 10 triliun yang mesti didapatkan Bali (DPD RI dan Universitas Udayana, 2009).

Secara teoritis, tinggi dan/atau rendah belanja modal ditetapkan dengan melihat tinggi dan/atau rendah DBH yang dianggarkan, sehingga dapat diasumsikan bahwa belanja modal berbanding lurus dengan DBH. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan dari sudut pandang yang

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

berbeda, Pujiati (2008), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini juga didukung oleh Santosa (2013), Riska, dkk.(2014), dan Hendriwiyanto (2015). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa DBH juga berbanding lurus dengan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Muryawan dan Sukarsa (2014), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Desentralisasi fiskal mewajibkan daerah memaksimalkan kemampuan fiskalnya, dengan menstimulasi berbagai sektor perekonomian dan mendongkrak komoditas elit daerah, serta stabilitas PAD melalui kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

Dalam Gugus (2013) menyatakan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan utama daerah yang paling krusial dalam memperbaharui infrastruktur daerah. PAD dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi, kemudian pengelolaan segenap kekayaan lainnya yang terpisah dari PAD. Hal ini menjadi landasan utama bagi daerah untuk mematuhi diri, guna memaksimalkan PAD melalui pengembangan segala kekayaan daerah yang potensial, sehingga kedepannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik serta infrastruktur lainnya. Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan PAD terbukti memengaruhi alokasi belanja modal secara positif dan signifikan. Temuan ini mengasumsikan tingkat PAD menjadi tolak ukur penting dalam penganggaran belanja modal. Selain berperan terhadap alokasi belanja modal, dari perspektif berbeda PAD juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mawarni dkk., 2013). Baghestani and McNown (1994), menyatakan bahwa terdapat

hubungan yang sangat kuat terkait eksistensi antara pendapatan dan belanja pemerintah federal U.S, dimana berdasarkan estimasi *error correction model* pendapatan maupun belanja berpengaruh terhadap tidak seimbangannya anggaran pemerintah.

Penelitian Kartika dan Dwirandra (2014) menyatakan ekspektasi dari PAD yang semakin menjulang tinggi adalah mampu mendongkrak alokasi belanja modal daerah, sehingga kualitas pelayanan publik lebih terjamin. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008), di mana PAD terbukti memengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan. PAD yang meningkat tidak selalu diiringi dengan meningkatnya anggaran belanja modal, karena PAD lebih terealisasi untuk membiayai belanja lainnya. Blackley (1986), menyatakan bahwa peningkatan pendapatan secara umum mendahului peningkatan belanja pemerintah, hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan menstimulasi peningkatan anggaran pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) yang membuktikan PAD tidak berhasil memengaruhi belanja modal. Alasannya karena PAD lebih dikonsentrasikan untuk membiayai belanja pegawai dan operasional harian. Inkonsistensi antar hasil temuan terdahulu, memotivasi penulis untuk kembali menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset sebelumnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan belanja langsung sebagai variabel intervening yang dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung pada pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan dengan menambahkan dana bagi hasil sebagai variabel independen.

## Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]

Teori pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) adalah landasan utama yang digunakan dalam menentukan hipotesis dalam penelitian ini. Rahardja dan Manurung (2008:233) menyatakan bahwa pendekatan pengeluaran memandang Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai akumulasi dari totalitas belanja dalam siklus perekonomian selama satu periode. Metode ini berasumsi bahwa pengeluaran secara agregat dibagi menjadi empat jenis, yaitu (1) konsumsi rumah tangga, (2) konsumsi pemerintah, (3) pengeluaran investasi, (4) ekspor neto.

Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$PDB = C + G + I + (X-M) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

C = Konsumsi rumah tangga                      I        = PMTDB (investasi)

G = Konsumsi pemerintah                      X        = Ekspor

M = Impor

Pendapatan nasional adalah salah satu mistar pengukur stabilitas perekonomian suatu Negara. Menurut Sukirno (2008:36) Pendapatan nasional dikaitkan dengan penggunaan penerimaan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Perhitungan pendapatan nasional sangat diperlukan dalam teori maupun kebijakan makro ekonomi dalam menghadapi beragam konflik sentral yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, bisnis, pengangguran, serta inflasi. Perhitungan pendapatan nasional dapat menjadi pemahaman mengenai bagaimana berbagai bagian dari suatu perekonomian saling berinteraksi

satu sama lainnya, dan menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai perubah makro ekonomi yang penting seperti output, pendapatan, dan pengeluaran. Dari data perhitungan pendapatan nasional dapat menjadi landasan dalam melakukan pengukuran kinerja perekonomian, pembuatan peramalan ekonomi dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:223) totalitas *output* dalam kancan nasional selama satu tahun menjadi pendorong efisiensi secara makro. Fenomena krusial dalam dunia ekonomi dapat ditunjukkan melalui peran aktif dari akumulasi output nasional. Pertama, akumulasi barang dan jasa diproduksi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi (jumlah pekerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) secara efisien, di mana seluruh *output* yang dihasilkan tersebut akan menjadi deskripsi awal sirkulasi ekonomi. Dengan asumsi, tingginya pendapatan nasional sejalan dengan tingginya efisiensi sumber daya ekonomi. Kedua, kemakmuran dan produktivitas suatu Negara diukur dengan totalitas output nasional (per kapita). Perhitungan *output* per kapita dihasilkan dengan asumsi, akumulasi *output* nasional dibagi jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Berlandaskan asumsi tersebut, maka tingginya *output* per kapita sejalan dengan tingginya kemakmuran. Produktivitas rata-rata diukur dengan *output* per tenaga kerja. Dengan asumsi tingginya angka mendeskripsikan produktivitas yang semakin tinggi. Ketiga, konflik mendasar perekonomian dapat dijelaskan melalui gambaran *output* nasional. Ini berarti perekonomian harus

segera diperbaharui, dengan memperbesar skala industrinya, agar ada keseimbangan kontribusi antara sektor pertanian dan sektor industri.

*Output* perekonomian dalam kancah nasional diukur dengan menghitung jumlah produk domestik bruto (PDB) selama suatu periode tertentu. Kemudian untuk tingkat provinsi atau daerah, *output* perekonomian diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB). Selanjutnya, baik antara PDB dan PDRB diartikan sebagai akumulasi dan/atau total dari nilai produksi perekonomian yang dihasilkan dalam satu periode tertentu, dengan tidak membedakan kepemilikan faktor produksi (dengan tidak memedulikan apakah berasal dari dalam dan/atau luar negeri) (Rahardja dan Manurung, 2008:253).

PDRB dapat digunakan untuk mengkalkulasi laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>1</sub>: PDRB tahun sekarang

PDRB<sub>0</sub>: PDRB tahun sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dimana PAD dinyatakan berpengaruh positif terhadap belanja modal (Maimunah, 2006; Tuasikal, 2008; Syakier, 2012; Setyowati dan Suparwati, 2012; Sularno, 2013; Arwati dan Hadiati, 2013; Hariyadi dan Mahaendra Yasa, 2014; Mayasari dkk.,

2014; Sugiardi dan Supadmi, 2014; Kartika dan Dwirandra, 2014). Kemudian Indraningrum (2011) dan Syamni, dkk. (2014) menyimpulkan PAD berpengaruh pada belanja langsung secara positif signifikan, hal ini berarti pengeluaran daerah disesuaikan dengan perubahan angka penerimaan atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Edogbanya and Sule (2013), memperoleh hasil bahwa terdapat relasi yang positif signifikan antara pendapatan dengan usaha pembangunan pemerintah meliputi infrastuktur dan sarana sosial lainnya melalui realisasi belanja. Dari sudut pandang lain, Pujiati (2008) membuktikan PAD mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan. Pernyataan ini juga senada dengan penelitian Hendriwiyanto (2015); Riska, dkk.(2014), Hariyadi dan Mahaendra Yasa (2014), Gunantara dan Dwirandra (2014).

PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah (Kartika dan Dwirandra, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Liliana *et al.* (2011) memperoleh hasil bahwa angka penerimaan berkorelasi sangat erat dengan tingkat belanja. Selanjutnya Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) membuktikan adanya relasi yang positif antara PAD dengan belanja modal. Artinya tingginya PAD mengindikasikan belanja modal yang semakin meningkat. Kemudian, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria, dengan perolehan hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

Secara teoritis, tinggi dan/atau rendah belanja modal ditetapkan dengan melihat tinggi dan/atau rendah DBH yang dianggarkan, sehingga dapat diasumsikan bahwa belanja modal berbanding lurus dengan DBH. DBH

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan dari sudut pandang yang berbeda, Pujiati (2008), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini juga didukung oleh Santosa (2013), Riska, dkk.(2014), dan Hendriwiyanto (2015). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa DBH juga berbanding lurus dengan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Muryawan dan Sukarsa (2014), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Desentralisasi fiskal mewajibkan daerah memaksimalkan kemampuan fiskalnya, dengan menstimulasi berbagai sektor perekonomian dan mendongkrak komoditas elit daerah, serta stabilitas PAD melalui kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

DBH adalah salah satu bagian dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan khusus, yang di transfer dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan memaksimalkan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah (Nehen, 2012:411). Semakin tinggi DBH maka ekspektasi tingkat pembangunan daerah semakin tinggi, sehingga DBH berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Pujiati (2008), Santosa (2013), Riska, dkk.(2014), dan Hendriwiyanto (2015).

Hubungan antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi diasumsikan dengan semakin tinggi DBH maka ekspektasi tingkat pembangunan daerah semakin tinggi (Pujiati, 2008; Santosa, 2013; Riska., dkk, 2014; Hendriwiyanto, 2015). Selanjutnya realisasi belanja langsung diasumsikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bose dan Osborn, 2007; Chude dan Chude, 2013). Hal ini



menunjukkan bahwa tingkat produktivitas barang dan jasa melalui pertumbuhan ekonomi membutuhkan realisasi belanja langsung yang besar, kemudian belanja langsung yang besar didanai dari alokasi penerimaan daerah yang salah satunya adalah DBH.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi setara dengan pengorbanan berupa belanja langsung yang besar, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa bagian dari belanja langsung, yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain jika pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan begitu sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) yang mengemukakan bahwa konsumsi pemerintah (anggaran belanja) merupakan salah satu elemen penting yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang terefleksi melalui *trend* PDB di kancah nasional.

Rrefleksi *trend* PDRB mendeskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipacu oleh tinggi rendahnya barang dan jasa yang dihasilkan, di mana untuk memaksimalkan produktivitas barang dan jasa diperlukan anggaran belanja langsung yang besar. ose and Osborn (2007), menemukan bahwa belanja modal pemerintah terbukti mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan, dimana pertumbuhan ekonomi dalam penelitian tersebut diprosikan melalui GDP. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Chude and Chude (2013) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif

signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa tingginya realisasi belanja langsung merupakan indikator penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Belanja langsung dalam penelitian ini sebagai variabel intervening yang menguji pengaruh langsung dan tak langsung pada PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PAD maka ekspektasi produksi barang dan jasa daerah akan meningkat, yang secara langsung mencerminkan pertumbuhan ekonomi meningkat (Pujiati, 2008; Riska dkk.,2014; Gunantara dan Dwirandra, 2014; Hariyadi dan Mahaendra Yasa, 2014; Hendriwiyanto, 2015). Hal ini tercermin dari tingginya realisasi belanja langsung guna mengalokasikan penerimaan daerah untuk memaksimalkan tingkat produksi barang dan jasa suatu daerah (PDRB).

H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh langsung terhadap belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2007-2013

H<sub>2</sub>: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan belanja langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2007-2013

H<sub>3</sub>: Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2007-2013

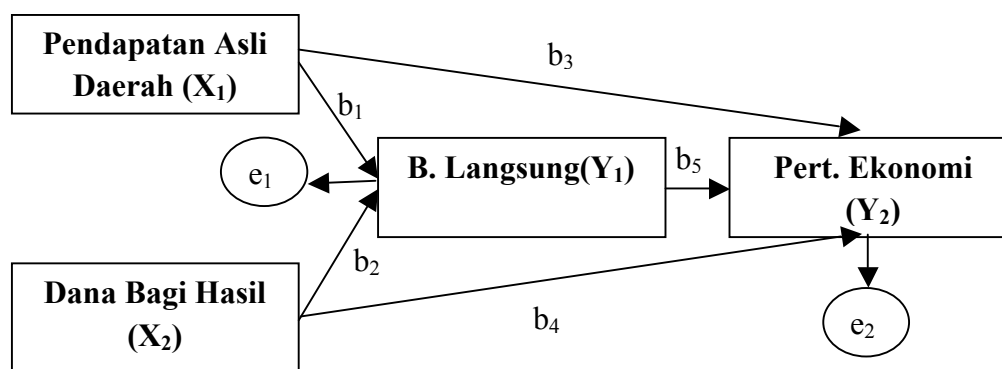
## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini diselenggarakan pada BPS Provinsi Bali. Terdapat dua jenis data yang dipakai, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa teori mengenai PAD, DBH, pertumbuhan ekonomi dan

belanja langsung. Kemudian data kuantitatif yang digunakan berupa data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali atas dasar harga konstan 2000, data realisasi anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, data realisasi dana bagi hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan data realisasi belanja langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Data dalam penelitian yang digunakan berdasarkan sumbernya adalah data sekunder di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kemudian data dikumpulkan melalui observasi non partisipan, dengan hanya mengumpulkan data yang telah tersedia oleh badan atau lembaga tertentu, di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya mengamati, mempelajari, serta mencatat uraian dari artikel, buku, skripsi, jurnal, dan dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, *browsing*, dan buku-buku literatur terkait. Teknik analisis data difokuskan pada penggunaan analisis jalur yang digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297) dengan menerapkan model regresi linear berganda untuk pengaruh langsung dan uji Sobel untuk pengaruh tidak langsung.

**Gambar 1.**  
**Model Analisis Jalur**



Berdasarkan gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

$Y_1$  = Belanja Langsung

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Bagi Hasil

$Y_2$  = Pertumbuhan Ekonomi

$e_1, e_2$  = variabel pengganggu

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini melalui 2 tahap yaitu (1) pengaruh pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja langsung , pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta (2) pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung dengan uji Sobel. Hasil uji pengaruh langsung disajikan dalam Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi**  
**Hubungan Antar Variabel**

Hubungan antar variabel	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig	Keterangan
	B	SE	B			
$X_1 \rightarrow Y_1$	0.444	0.031	0.395	14.452	0.000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0.71	0.240	0.018	0.295	0.769	Tidak Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0.185	0.725	0.044	0.256	0.799	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	9.303	2.682	0.281	3.468	0.001	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	5.408	1.440	0.633	3.756	0.000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$  menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja langsung ( $Y_1$ ), sedangkan dana bagi hasil dengan nilai sig.  $0.769 > 0.05$  menunjukkan bahwa dana bagi hasil ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja langsung ( $Y_1$ ).

Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai sig. yaitu  $0.799 > 0.05$  menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ), dana bagi hasil dengan nilai sig.  $0.001 < 0.05$  menunjukkan bahwa dana bagi hasil ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ). Belanja langsung memiliki nilai sig.  $0.000 < 0.05$  menunjukkan bahwa belanja langsung ( $Y_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,429)^2 (0,554)^2 \\ &= 0,944 \end{aligned}$$

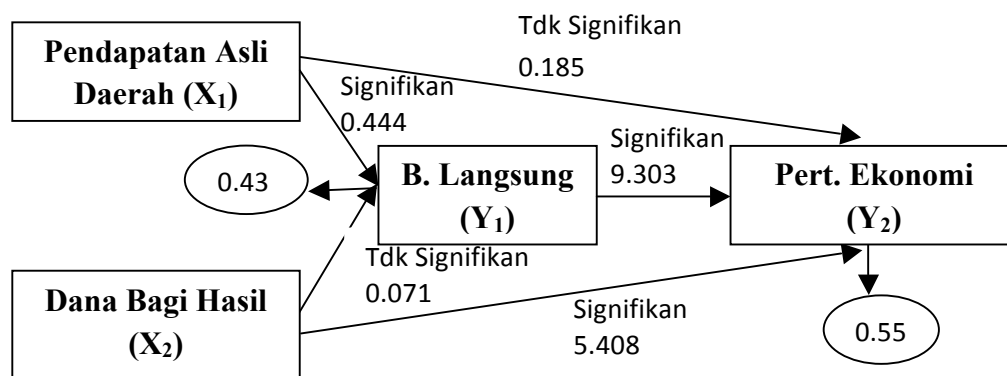
Keterangan :

$R^2_m$  : Koefisien determinasi total  
 $e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 94.4 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 94.4

persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 5.6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

**Gambar 2.**  
**Diagram Hasil Analisis Jalur**



Sumber: Data diolah, 2015

Pengujian pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung dilihat melalui nilai z dari koefisien ab yang diperoleh dengan mencari nilai S terlebih dahulu.

**Tabel 5.**  
**Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung**

Hub antarvariabel	Variabel mediasi	Z	Keterangan
X <sub>1</sub> →Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	3.623	Signifikan
X <sub>2</sub> →Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	0.295	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5. diatas nilai Z hitung sebesar  $3.623 > 1.64$ . Artinya belanja langsung (Y<sub>1</sub>) merupakan variabel intervening dalam pendapatan asli daerah (X<sub>1</sub>) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y<sub>2</sub>) di Provinsi Bali atau dengan kata lain pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung.

Kemudian berdasarkan Tabel 2. nilai  $Z$  hitung sebesar  $0.295 < 1.64$ . Artinya belanja langsung ( $Y_1$ ) bukan merupakan variabel intervening dalam dana bagi hasil ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dengan kata lain dana bagi hasil tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik tiga simpulan, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung.
- 2) Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain: (1) disarankan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk memaksimalkan pengalokasian penerimaan daerah, yaitu PAD pada anggaran belanja pembangunan (belanja langsung) sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, (2) disarankan pada pemerintah daerah agar DBH yang

diperoleh dari pusat dipertimbangkan kembali, karena terjadi ketimpangan perimbangan dana dari pusat ke daerah, di mana dana perimbangan (DBH) yang diterima pusat lebih besar daripada daerah sehingga, DBH yang dialokasikan dari pusat ke daerah belum mampu memaksimalkan belanja langsung (pembangunan) pemerintah daerah dan belum berhasil merealisasikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

## **REFERENSI**

- Adi, P. H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Akeem, U.O. Revenue Allocation Formula and Its Impact On Economic Growth Process In Nigeria. *Journal of Economic and Sustainable Development*. Vol. 2(3): 29-38.
- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakili, A. M. 2013. Nexus Between Public Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. Vol. 2(4): 2383-2395.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- . 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Arwati, D., dan Hadiati, N. 2013. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan*. Hal. 498-507
- Aschauer, D. A. 1989. Is Public Expenditure Productive?. *Journal of Monetary Economics*. Vol. 23: 177-200.



- Babatunde, A., and Christoper, R. O. 2013. The Impact of Public Capital Expenditure and Economic Grwth in Nigeria. *Global Journal of Economic and Finance*. Vol. 2(1): 1-11.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2014. *Bali Dalam Angka*. Bali.
- Baghestani, H., and McNown, R. 1994. Do Revenues or Expenditures Respond to Budgetary Disequilibria?. *Southern Economic Journal*. Vol. 61(2): 311-322.
- Blackley, P. R. 1986. Causality Between Revenues and Expenditure and The Size of The Federal Budget. *Public Finance Quarterly*. Vol. 14(2): 139-156.
- Boediono. 1981. *Teori Belanja langsung*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- . 2008. *Teori Belanja langsung*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bose, N., Haque, M.E., and Osborn, D.R. 2007. Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries. *The Manchester School*. Vol. 75(5): 533-556.
- Chinweoke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The MacrotHEME Review*. Vol. 3(7): 79-87.
- Chude, N. P., and Chude, D. I. 2013. Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*. Vol. 1(4): 64-71.
- Cooray, A. V. 2009. Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *Comparative Economic Studies*. Vol 51(3): 401-418.
- Darmawati., Jefri, Rini., dan Sari, Ratna. Economic Growth, Regional Revenue (Pad), And General Allocation Fund (Dau), Of Allocation Of Capital Expenditure. Hasanuddin University, State University of Makassar, and MoeslimUniversity of Indonesia.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar, 26-28 Juli 2007.
- DPD RI dan Universitas Udayana. 2009. Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah dan Implikasinya Terhadap Hubungan Keuangan, Pelayanan Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi. *Laporan Penelitian*. Tersedia pada: <http://www.lawcenter.dpd.go.id>. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

- Edogbanya., Adejoh., and Sule, J.G. 2013. Revenue Generation: It's impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business research Administration and Management*. Vol. 13(4): 1-15.
- Gugus Wandira, Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Pertumbuhan ekonomi. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. AAJ Vol. 2(1): 44-51.
- Gunantara, P. C., dan Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja langsung dengan Pertumbuhan ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 7(3): 529-546.
- Hariyadi, E., dan Mahaendra Yasa, N. 2014. Pengaruh PAD Terhadap PDRB dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3(12): 586-593.
- Hendriwiyanto, G. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja langsung Dengan Pertumbuhan ekonomi Sebagai Variabel Mediasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Indraningrum, T. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali). *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Kartika Jaya, I Putu., Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Pertumbuhan ekonomi Dengan Belanja langsung Sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Udayana: Fakultas Ekonomi. E-Jurnal Vol 7(1): 79-92.
- Kitchen, Harry. 2004. Financing Local Government Capital Investment. *A workshop on: Strengthening Responsive and Accountable Local Government in China Organized by the Ministry of Finance, China, Canadian, Agency for International Development and World Bank Dali, Yunnan Province in China*. Department of Economics Trent University, Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B8.
- Kusnandar., dan Siswanto, D. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Liliana, B., Diana, M., and Carmen, C. 2011. Is There Correlation Between Government Expenditure, Population, Money Supply and Government Revenues?. *International Journal of Arts and Science*. Vol. 4(12): 241-254.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada

- Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Hal. 1-27.
- Marliyanti, D. S., dan Arka, S. 2014. Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3(6): 265-271.
- Masdjoho, G. N., dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA*. Vol. 6(1): 32-50.
- Mawarni., Daerwanis., dan Syukriy, Abdullah. 2013. Pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap belanja langsung daerah (studi pada kabupaten/kota di Aceh).
- Mayasari, P. R., Sinarwati, N. K., dan Yuniartha G. A. 2014. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol. 2(1).
- Muryawan, S. M., dan Sukarsa, M. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja langsung Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3(10): 440-451.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press.
- Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. *Business and Economic Journal*. Vol. 2010: BEJ-4: 1-11.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*. Vol. 1(7): 1-15.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 4(11): 172-182.
- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*. Vol. 3(3): 54-60.

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan ekonomi. *Skripsi*. Universitas Siliwangi.
- Perdana, Lia. 2013. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Universitas Pendidikan Ganesha: Fakultas Ekonomi. *JINAH*. Vol. 2(2): 715-737.
- Pujiati, Amin. 2008. Analisis Belanja langsung di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 13(2): 61-70.
- Purnama, A. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahardja, Pratama., dan Mandala, Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riska, A. A. I., Ahmidati, F. N., Lolowang, N. H., dan Anggraini, R. M. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung daerah tahun 2008-2012. [http://www.academia.edu/8095829/Pengaruh\\_PAD\\_dan\\_dana\\_perimbangan\\_terhadap\\_Pertumbuhan\\_Ekonomi\\_Regional](http://www.academia.edu/8095829/Pengaruh_PAD_dan_dana_perimbangan_terhadap_Pertumbuhan_Ekonomi_Regional). Diakses Tanggal 2 Juni 2015.
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Vol. 1(2).
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Pertumbuhan ekonomi 33 Provinsi di Indoensia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5(2): 130-143.

- Santosa, Purbayu. B., dan Rahayu, Retno. P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2(1): 9-18.
- Setyowati, L., dan Suparwati, Y. K. 2012. Pengaruh Belanja langsung, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi Sebagai Variabel Inervening. *Prestasi*. Vol. 9(1): 113-133.
- Sufyetti. 2012. Analisis Belanja langsung dan Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Agam. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1(1): 165-186.
- Sularno, F. M. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sugiardi, E. R., dan Supadmi, L. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Pertumbuhan ekonomi Dengan Belanja langsung Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 7(2): 477-495.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- . 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. “*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Sumartini, A., dan Murjana Yasa, W. 2015. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja langsung Melalui Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 4(4): 258-271.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- . 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar
- Syakier, Husin. 2012. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Study Empiris di Wilayah Karesidenan Surakarta). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **Pengaruh PAD dan... [Ni Wayan Nuryanti Dewi, Made Kembar Sri Budhi]**

- Syamni, G., Husodo, Z., dan Syarifuddin. 2014. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan*. Vol. 3(5). Hal 11-19.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 1(2):142-155.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Pertumbuhan ekonomi (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.